

BAB II

LATAR BELAKANG SOSIAL-POLITIK KOTA SEMARANG

Pemaparan pada bab 2 akan berisi penyajian data mengenai gambaran garis besar Kota Semarang secara umum sebagai daerah penelitian dari berbagai aspek, baik mengenai demografi sosial maupun dinamika politik yang terjadi. Pembahasan pada bab 2 akan dibagi menjadi 5 sub bab utama, yakni:

- Sub-bab 2.1 Gambaran Umum dan Sejarah Kota Semarang
- Sub-bab 2.2 Kondisi Geografis, Sosial, dan Ekonomi di Kota Semarang
- Sub-bab 2.3 Dinamika Elektoral di Kota Semarang
- Sub-bab 2.4 Proses Tahapan & Hasil Rekapitulasi Pilpres di Kota Semarang
- Sub-bab 2.5 Kesimpulan Akhir Bab 2

2.1 Gambaran Umum dan Sejarah Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salahsatu kota besar di Indonesia yang menjadi ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang di dalamnya menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang. Saat itu, Kota Semarang terpilih menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah diantara beberapa kota lain. Provinsi Jawa Tengah sendiri ketika dibentuk melalui Undang-Undang tersebut masih berbentuk atas pecahan beberapa wilayah kerasidenan yang terdiri dari kerasidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, serta Surakarta yang kemudian wilayah tersebut ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif wilayah, Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai wilayah dengan kelurahan terbanyak dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki total 29 Kabupaten dan 6 Kota. Berikut merupakan perbandingan jumlah kelurahan di seluruh Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. 1 Jumlah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan di Jawa Tengah

Wilayah Administratif Kota Di Jawa Tengah	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan menurut Kota di Provinsi Jawa Tengah					
	Kecamatan			Kelurahan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1. Kota Magelang	3	3	3	17	17	17
2. Kota Surakarta	5	5	5	54	54	54
3. Kota Salatiga	4	4	4	23	23	23
4. Kota Semarang	16	16	16	177	177	177
5. Kota Pekalongan	4	4	4	27	27	27
6. Kota Tegal	4	4	4	27	27	27
Provinsi Jawa Tengah	36	36	36	325	325	325

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2024)

Data diatas menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi wilayah kota dengan jumlah kecamatan dan jumlah kelurahan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Akumulasi tersebut menggambarkan secara kuantitas Kota Semarang sebagai wilayah yang memiliki peta administratif jauh lebih banyak daripada kota lainnya di Jawa Tengah.

Di Kota Semarang, kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Gunungpati dengan jumlah sebanyak 16 Kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Candisari, Gayamsari, dan Tugu memiliki jumlah kelurahan yang paling sedikit yakni hanya sebanyak 7 kelurahan. Sementara kecamatan lain, memiliki persebaran normal diantara 8 kelurahan sampai 15 kelurahan. Kecamatan dengan kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Gunungpati dengan 16 kelurahan, Kecamatan Semarang Tengah dengan 15 kelurahan, dan Kecamatan Mijen dengan 14 kelurahan. Adapun kecamatan yang memiliki kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari, serta Kecamatan Tugu dengan masing-masing hanya 7 kelurahan saja. Berikut merupakan tabel jumlah keseluruhan kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kota Semarang.

Tabel 2. 2 Jumlah Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2022

Nama Kecamatan di Kota Semarang	Jumlah Kelurahan
1. Kec. Mijen	14
2. Kec. Gunungpati	16
3. Kec. Banyumanik	11
4. Kec. Gajah Mungkur	8
5. Kec. Semarang Selatan	10
6. Kec. Candisari	7
7. Kec. Tembalang	12
8. Kec. Pedurungan	12
9. Kec. Genuk	13
10. Kec. Gayamsari	7
11. Kec, Semarang Timur	10
12. Kec. Semarang Utara	9
13. Kec. Semarang Tengah	15
14. Kec. Semarang Barat	16
15. Kec, Tugu	7
16. Kec. Ngaliyan	10
Jumlah Kelurahan	177

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Dalam aspek Pemerintahan, nyaris seluruh kegiatan birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berada dalam kawasan Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi yang menjadi tulang punggung Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, perizinan birokrasi bukan hanya mencakup level Kota Semarang saja, namun sentralistik terhadap administrasi pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah juga berada di Kota Semarang. Contoh adalah Kantor Gubernur Jawa Tengah, DPRD Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah (KPU Jateng) serta Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang semuanya berada di Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan betapa vitalnya kota ini

sebagai jantung pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki daya tarik lain seperti wisata Kota Lama, Lawang Sewu, dan lain-lain.

Secara Historis, Kota Semarang memiliki jejak sejarah yang sangat panjang sejak zaman kerajaan kuno. Hal tersebut berawal dari Kerajaan Mataram kuno pada sekitar abad ke 8 Masehi, yakni daerah pesisir yang dikenal sebagai Pragota. Pragota merupakan pelabuhan penting yang menjadi sentra dan pusat perdagangan serta transportasi saat itu. Wilayah ini berada di depan gugusan pulau-pulau kecil yang kemudian seiring waktu berkembang dan menyatu menjadi sebuah daratan yang sekarang dikenal sebagai daerah Semarang Bawah. Semarang sendiri saat ini dikenal banyak orang terbagi atas Semarang Bawah dan Semarang Atas. Semarang Atas lebih menunjukkan demografi pegunungan dengan daerah-daerah yang cenderung masih bernuansa pedesaan, sementara Semarang Bawah adalah daerah yang menunjukkan demografi sebagai kota metropolitan atau pusat perkotaan yang cenderung lebih modern yang berisi seluruh sentral dan pusat pemerintahan saat ini, termasuk pusat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya setelah melewati masa dari berbagai kerajaan lokal di nusantara, pada tahun 1602 datanglah VOC dari Belanda ke Bumi Nusantara. Setelah melakukan monopoli perdagangan pasca kedatangannya, beberapa daerah mulai takluk di bawah VOC, termasuk daerah Semarang. Pada tahun 1678, Semarang diserahkan kepada VOC oleh Amangkur II dari Mataram sebagai pembayaran hutang. Kemudian pada tahun 1705, Susuhunan Pakubowono I menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai bagian dari perjanjian karena bantuan VOC dalam merebut Kartasura. Maka semenjak itu, Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1942 datanglah Jepang ke Indonesia sekaligus mengakhiri Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan beralih di tangan militer Jepang.

Pada masa militer Jepang, pada 14-19 Oktober 1945 terjadi hari yang bersejarah karena terjadi pertempuran besar di Semarang. Pertempuran tersebut adalah pertempuran lima hari di Semarang dimana para pemuda menolak menyerahkan diri dan memutuskan untuk berjuang melawan kependudukan Jepang. Setelah itu, pada tanggal 1 April 1950 Mayor Suhardi, yakni Seorang KMKB Semarang (Komandan Militer Kota Besar) menyerahkan kepemimpinan Pemerintah Daerah Semarang kepada Mr. Koesoedibyo, yakni seorang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta saat itu untuk menyusun kembali aparatur pemerintahan sipil di Semarang agar dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1950 juga keluar UU nomor 10 tentang Pembentukan Provinsi Jawa tengah yang menjadikan Kota Semarang sebagai sentra pemerintahan. Sejak saat itu, Semarang terus berkembang sampai menjadi kota metropolitan seperti sekarang.

Tercatat dari usia Kemerdekaan Indonesia pada 1945, kepemimpinan Kota Semarang telah terjadi pergantian sebanyak 15 kali hingga saat ini (tahun 2024). Jabatan terakhir walikota Semarang dipegang oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu, yakni politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat wali kota Semarang periode 2019-2024. Sementara itu, pilihan walikota akan dilaksanakan kembali pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Semarang yang baru periode 2024-2029. Hal tersebut nyaris berbarengan dengan kontestasi pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dikarenakan kontestasi Pilkada (Pilihan Kepala Daerah: Pilgub, Pilwalkot, Pilbup) dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia (ditahun yang sama).

2.2 Kondisi Geografis, Sosial, dan Ekonomi di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan sebuah Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang berada pada perlintasan jalur utama Pulau Jawa yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan Ibu Kota DKI Jakarta. Secara Geografis, Kota Semarang terletak diantara 109° 35 - 110° 50 Bujur Timur dan 6° 50- 7° 10 Lintang Selatan dengan ketinggian antara 0,75 sampai 348,00 di atas garis pantai

Tabel 2. 3 Garis Lintang Batas Kota Semarang

<i>Description</i>	<i>Borderline</i>	
	<i>Latitude</i>	<i>Explanatation</i>
Sebelah Utara (<i>Nort</i>)	6 ⁰ 50 " LS	Lau Jawa
Sebelah Selatan (<i>South</i>)	7 ⁰ 10 " LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat (<i>West</i>)	109 ⁰ 50 " BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur (<i>East</i>)	110 ⁰ 35 " BT	Kabupaten Demak

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2020)

Total luas dari Kota Semarang adalah sebesar 373,78 km² yang tersebar menjadi 16 pecahan wilayah administrasi 16 kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda dari mulai yang sangat luas hingga paling kecil. Berikut merupakan luas masing-masing kecamatan di Kota Semarang.

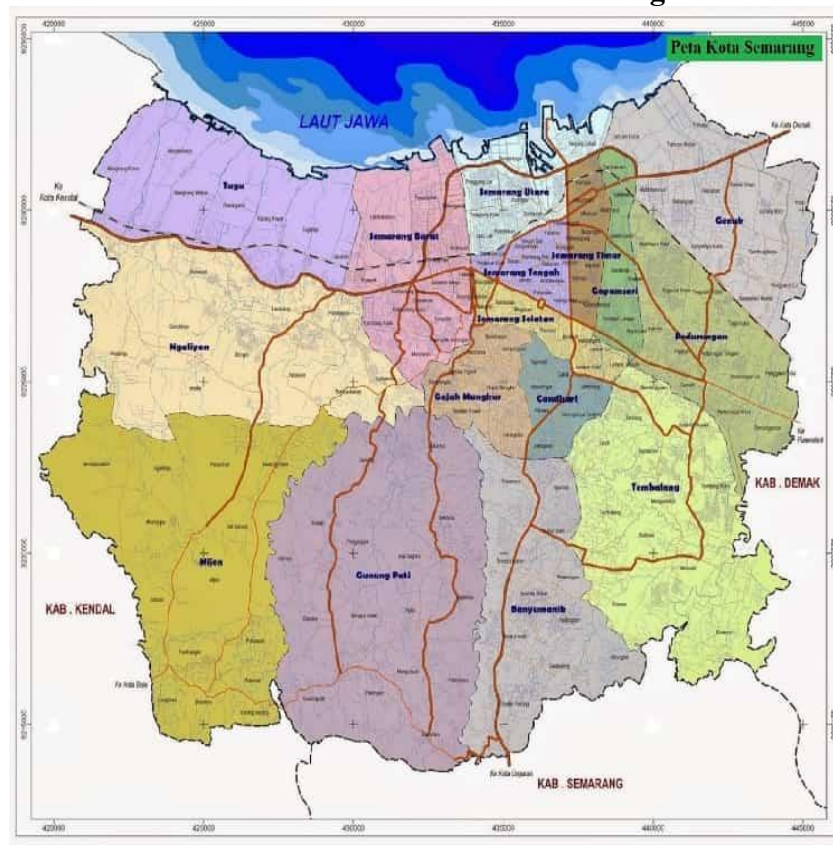
Tabel 2. 4 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Wilayah di Kota Semarang	Luas Wilayah	Persentase
1. Kecamatan Mijen	56.52 km ²	15,12%
2. Kecamatan Gunungpati	58.27 km ²	15,59%
3. Kecamatan Banyumanik	29.74 km ²	7,96%
4. Kecamatan Gajahmungkur	9.34 km ²	2,50%
5. Kecamatan Semarang Selatan	5.95 km ²	1,59%
6. Kecamatan Candisari	6.40 km ²	1,71%
7. Kecamatan Tembalang	39.47 km ²	10,56%
8. Kecamatan Pedurungan	21.11 km ²	5,65%
9. Kecamatan Genuk	25.98 km ²	6,95%
10. Kecamatan Gayamsari	6.22 km ²	1,66%
11. Kecamatan Semarang Timur	5.42 km ²	1,45%
12. Kecamatan Semarang Utara	11.39 km ²	3,05%
13. Kecamatan Semarang Tengah	5.17 km ²	1,38%
14. Kecamatan Sng Barat	21.68 km ²	5,80%
15. Kecamatan Tugu	28.13 km ²	7,52%
16. Kecamatan Ngaliyan	42.99 km ²	11,50
Total	373, 78 km²	100%

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Data diatas menunjukkan dari segi administratif wilayah, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen menempati dengan luas wilayah paling lebar, yakni masing masing sebesar 58.27 km² dan 56.52 km². Sementara itu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan menjadi wilayah dengan lebar yang paling kecil, yakni masing masing hanya sebesar 5.17 km², 5.42 km², dan 5.95 km². Sementara kecamatan lain mayoritas beragam yang rata-rata belasan dan puluhan kilometer persegi

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: *Map of Subdistrict in Semarang City* (Subiyanto dan Amarrohman, 2018)

Dari sudut pandang topografi terdiri atas dataran pantai, perbukitan, dan juga area dataran rendah. Kawasan pantai adalah wilayah pada bagian utara yang memiliki batas langsung dengan laut Jawa dengan tingkat kemiringan mencapai 0% hingga 2%. Kemudian wilayah dataran rendah adalah wilayah yang terletak pada

bagian kawasan tengah dengan intensitas kemiringan antara 2-15%. Sedangkan pada kawasan perbukitan berada pada area selatan dengan intensitas kemiringan mencapai 15%-40%. Selain itu terdapat beberapa kawasan juga di area perbukitan dengan tingkat kemiringan 40% bahkan lebih dari 40%.

Sejalan dengan letak geografis, Kota Semarang memiliki iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson yang menghasilkan 2 musim, yakni musim kemarau sekitar bulan April – September dan musim penghujan sekitar bulan Oktober-Maret. Sementara itu, rata-rata curah hujan pertahun diperkirakan sekitar 2.500 Mm dengan suhu udara rata-rata pertahun sekitar 27,10° C – 29,6° C. Tekanan udara Kota Semarang mencapai 1005.80 mb sampai 1009.50 mb. Pada kecepatan angin dikisaran 4.40 Km/jam sampai dengan 8.70 Km/jam. Untuk sistem hidrologi atau pengairan, Kota Semarang mendapatkan sumber air dari wilayah Ungaran yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran yang mengalir beberapa sungai esar seperti Kali Basole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron, dan lain lain. Dengan kondisi kawasan daerah hilir, maka dengan otomatis limpahan debit air dari sungai yang melintas akan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan karena debit air sungai yang melebar dan tumpah ke daratan.

Sedangkan dalam pengelolaan tata ruang Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031. Pada BAB IA disebutkan bahwa Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kota Semarang meliputi 39.923 hektar dengan rincian 38.999 hektar adalah daratan dan sisanya yakni 797 hektar adalah luas reklamasi perairan. Selanjutnya, menurut pasal tersebut nomor (3) wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 Kecamatan dikelompokkan menjadi beberapa BWK (Bagian Wilayah Kota). BWK tersebut akan akan dikelompokkan sesuai dengan komoditas dan sumber daya di daerah Kota Semarang sesuai dengan kecamatan masing-masing. Berikut merupakan matriks dari BWK sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor Tahun 2021.

Tabel 2. 5 Fungsi Utama Pengelolaan Tata Ruang Kota Semarang

Area Bagian Wilayah Kota	Fungsi Utama Area BWK	Cakupan Wilayah	Keterangan Fungsi
BWK I	1. Perdagangan dan Jasa bersekala Internasional 2. Pusat Pemerintahan Provinsi 3. Pusat Pemerintahan Kota	• Kecamatan Semarang Tengah, • Kecamatan Semarang Timur • Kecamatan Semarang Selatan	➤ Pusat Pelayanan Kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan administrasi pelayanan setingkat kota/regional yang diarahkan memiliki ruang interaksi publik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
BWK II	1. Pusat Pendidikan Kepolisian 2. Pusat Olahraga	• Kecamatan Candisari • Kecamatan Gajahmungkur	
BWK III	1. Transportasi Laut 2. Transportasi Udara 3. Kantor Pelayanan Pemerintahan Provinsi	• Kecamatan Semarang Barat • Kecamatan Semarang Utara	
BWK IV	1. Pengembangan fungsi utama Industri	• Kecamatan Genuk	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK IV meliputi Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo;
BWK V	1. Perdagangan dan Jasa 2. Jasa Pertemuan dan Pameran	• Kecamatan Gayamsari • Kecamatan Pedurungan	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK V meliputi Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan Pedurungan Lor;
BWK VI	1. Pengembangan fungsi utama Pendidikan Tinggi	• Kecamatan Tembalang	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK VI meliputi Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo
BWK VII	1. Perkantoran Militer 2. Perdagangan dan Jasa	• Kecamatan Banyumanik	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK VII meliputi Kelurahan Srandol Kulon, Kelurahan Srandol Wetan, Kelurahan Banyumanik;
BWK VIII	1. Pendidikan Tinggi 2. Paru-Paru Kota	• Kecamatan Gunungpati	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK VIII meliputi Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plangan, Kelurahan Cepoko, dan Kelurahan Nongkosawit
BWK IX	1. Kantor Pelayanan Pemerintah Kota 2. Paru-Paru Kota	• Kecamatan Mijen	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK IX meliputi Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Wonolopo
BWK X	1. Perdagangan dan Jasa 2. Industri	• Kecamatan Ngaliyan • Kecamatan Tugu	➤ sub pusat pelayanan kota di BWK X meliputi Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari

Sumber: Diolah dari Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021

Dari segi kependudukan, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yaitu 1.659.975 jiwa. Salahsatu sumber dari data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Di Indonesia, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali, yakni dari mulai tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan sensus terakhir 2020. Data penduduk yang disajikan disini merupakan data terakhir yang diolah dari BPS, yakni tahun 2022. Untuk tahun yang tidak disensus, data kependudukan diperoleh dari akumulasi proyeksi penduduk. Caranya adalah menggunakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2022

Wilayah di Kota Semarang	Jumlah Penduduk	Persentase
1. Kecamatan Mijen	85.818	5,17%
2. Kecamatan Gunungpati	98.674	5,94%
3. Kecamatan Banyumanik	141.319	8,51%
4. Kecamatan Gajahmungkur	55.490	3,34%
5. Kecamatan Semarang Selatan	61.212	3,69%
6. Kecamatan Candisari	74.461	4,49%
7. Kecamatan Tembalang	193.480	11,66%
8. Kecamatan Pedurungan	193.125	11,63%
9. Kecamatan Genuk	128.696	7,75%
10. Kecamatan Gayamsari	69.334	4,18%
11. Kecamatan Semarang Timur	65.427	3,94%
12. Kecamatan Semarang Utara	116.054	6,99%
13. Kecamatan Semarang Tengah	54.338	3,27%
14. Kecamatan Semarang Barat	146.915	8,85%
15. Kecamatan Tugu	33.079	2%
16. Kecamatan Ngaliyan	142.553	8,59%
Total	1.659.975	100%

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kecamatan di Kota Semarang yang memiliki penduduk terbanyak adalah kecamatan Tembalang dengan 193.480 jiwa (11%) dan kecamatan Pedurungan dengan total 193.125 (11%). Hanya dua kecamatan tersebut yang akumulasi presentasinya diatas 10%. Sementara itu, Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tugu dengan 33.079 jiwa (2%), kecamatan Gajahmungkur dengan 55.490 jiwa (3%), serta kecamatan Semarang Selatan dengan total penduduk 61.212 (3%). Sisanya relatif diantara 4% sampai 8% dari total keseluruhan. Total seluruh penduduk adalah 1.659.975 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 4.441 jiwa/km.

Sedangkan pada rasio jenis kelamin (*sex ratio*), Kota Semarang memiliki proporsi yang nyaris berimbang. Hal tersebut tergambarkan pada rata-rata (*average*) rasio jenis kelamin di Kota Semarang yang mencapai 97,93. Maka, data tersebut mengkonfirmasi bahwa jumlah perempuan memiliki kuantitas lebih banyak walaupun tidak terlalu jauh. Data rata-rata rasio jenis kelamin tersebut menunjukkan persebaran berbasis gender memiliki perbandingan setiap 97,93 laki-laki maka terdapat 100 orang perempuan. Hal tersebut termasuk ideal karena proporsi gender tidak mengalami ketimpangan yang sangat tinggi. Berikut merupakan matriks perbandingan penduduk berbasis jenis kelamin dan juga rasio jenis kelamin tiap kecamatan.

Tabel 2. 7 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Semarang Pada Tahun 2022

Wilayah	Jenis Kelamin				Total Persentase	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		
Kecamatan Mijen	42.908	50%	42.910	50%	100%	100,00
Kecamatan Gunungpati	49.341	50%	49.333	50%	100%	100,02
Kecamatan Banyumanik	69.717	49%	71.602	51%	100%	97,37
Kecamatan Gajahmungkur	27.204	49%	28.286	51%	100%	96,17
Kecamatan Semarang Selatan	29.744	49%	31.468	51%	100%	94,52
Kecamatan Candisari	36.709	49%	37.752	51%	100%	97,24
Kecamatan Tembalang	96.306	50%	97.174	50%	100%	99,11
Kecamatan Pedurungan	95.667	50%	97.458	50%	100%	98,16
Kecamatan Genuk	64.514	50%	64.182	50%	100%	100,52
Kecamatan Gayamsari	34.421	50%	34.913	50%	100%	98,59
Kecamatan Semarang Timur	31.729	48%	33.698	52%	100%	94,16
Kecamatan Semarang Utara	57.341	49%	58.713	51%	100%	97,66
Kecamatan Semarang Tengah	26.002	48%	28.336	52%	100%	91,76
Kecamatan Semaranag Barat	72.102	49%	74.813	51%	100%	96,38
Kecamatan Tugu	16.575	50%	16.504	50%	100%	100,43
Kecamatan Ngaliyan	71.025	50%	71.528	50%	100%	99,30
Sub Total	821.305	-	838.670	-	100%	-
Total	1.659.975				100%	97,93

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Pada perbandingan jenis kelamin sebagaimana data pada tabel diatas, terlihat nyaris seluruh Kecamatan di Kota Semarang memiliki proporsi jenis kelamin yang berimbang. Jumlah laki-laki terbanyak terdapat di Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 96.306 jiwa dan kecamatan Pedurungan sebesar 95.667 jiwa. Kedua kecamatan tersebut memiliki proporsi yang seimbang masing-masing dengan proporsi sebesar 50%. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk perempuan terbanyak juga di wilayah kecamatan Tembalang dan Pedurungan dengan masing masing 97.174 dan 97.458 jiwa dengan proporsi juga masih sekitar 50%. Meski demikian, pada tabel perbandingan rasio jenis kelamin, keduanya menunjukkan skor masing masing dibawah seratus (99,11 dan 98,16) yang artinya jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada kedua wilayah tersebut.

Sementara itu untuk wilayah dengan jumlah penduduk laki-laki paling sedikit adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah 16.575 jiwa. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah perempuan paling sedikit juga pada Kecamatan tugu dengan 16.504 jiwa. Meskipun paling kecil, proporsi keduanya seimbang dengan masing masing pada skor 50%. Sedangkan menurut kalkulasi jenis kelamin pada wilayah ini, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan yang ditunjukkan oleh skor rasio jenis kelamin yang menyentuh angka diatas 100, yakni sebesar 100,43. Selain tugu, kecamatan paling sedikit untuk jumlah laki-laki dan perempuan adalah Gajahmungkur dan Semarang Tengah yang masing masing berpenduduk 27.204 dan 26.002 jiwa untuk laki-laki serta 28.286 dan 28.336 untuk perempuan.

Kesimpulan pada penduduk berbasis gender diatas adalah secara umum penduduk Kota Semarang memiliki persebaran jenis kelamin yang berimbang/merata antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada perbandingan rasio jenis kelamin yang tidak terlalu jauh dari angka 100 (angka acuan pada gini rasio jenis kelamin). Hal tersebut menandakan tidak ada ketimpangan yang berarti pada penggolongan jenis gender ini. Data persebaran gender sangatlah penting untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial

pada suatu wilayah, terutama pembangunan gender agar terjadi kesetaraan pembangunan sosial antara laki-laki- perempuan secara adil dan merata.

Selanjutnya merupakan komposisi penduduk menurut kelompok umur. Di Kota Semarang memiliki persebaran umur yang sangat variatif, namun mayoritas paling banyak adalah kelompok umur pada generasi gen Z (usia 8 - 23 tahun) dan generasi milenial (24-39 tahun). Berikut persebaran penduduk berdasarkan kelompok usia tersaji pada data berikut:

Tabel 2. 8 Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	59.101	56.283	115.384
5 - 9	61.865	59.196	121.061
10 - 14	63.815	60.517	124.332
15 - 19	65.937	61.897	127.834
20 - 24	62.965	60.391	123.356
25 - 29	64.097	63.745	127.842
30 - 34	65.280	66.154	131.434
35 - 39	67.209	68.102	135.311
40 - 44	66.353	68.052	134.405
45 - 49	59.709	62.734	122.443
50 - 54	52.471	56.642	109.113
55 - 59	45.089	50.074	95.163
60 - 64	36.590	40.450	77.040
65 - 69	26.271	30.137	56.408
70 - 74	13.534	16.252	29.786
75 +	11.019	18.044	29.063
Jumlah	821.305	838.670	1.659.975

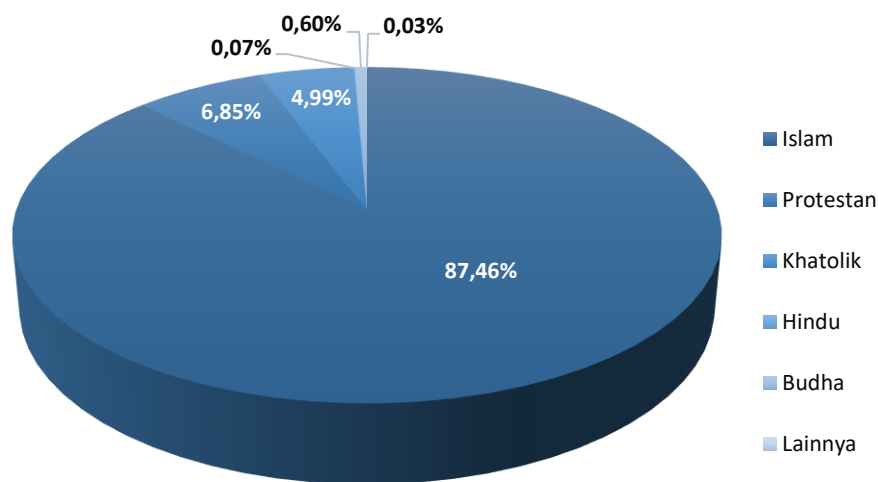
Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Pemilih pemula yang mayoritas masih bersekolah (di SMA) berada pada range angka usia 15-19 tahun. Pada tabel 2.8 diatas menunjukkan jumlah mereka secara keseluruhan mencapai 127.834 dengan rasio perbandingan laki-laki

sebanyak 65.937 dan Perempuan mencapai 61.897 orang. Dari total 127.834 orang tersebut tidak semuanya masuk ke dalam pemilih pemula, karena kriteria pemilih pemula adalah minimal batas usia 17 tahun. Menurut ketua Disdukcapil Kota Semarang, hanya sekitar 40 ribuan dari angka tersebut yang nantinya memiliki hak suara yang tersebar pada sekolah-sekolah di Kota Semarang. Sementara itu, data diatas juga mengkonforimasi bahwa jumlah penduduk terbesar adalah generasi milenial (pada usia 35-39 tahun) dengan jumlah sebesar 135.311 jiwa. Sementara untuk golongan paling kecil berada pada generasi *boomer atau pre boomer* (pada usia 70 tahun dan 75 tahun ke atas) dengan populasi sebesar 29.786 dan 29.063.

Kependudukan menurut agama di Kota Semarang memiliki proporsi yang variatif. Di Indonesia sendiri mengakui 6 jenis agama, yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan juga Konghucu. Di Kota Semarang, proporsi agama tidak merata secara kuantitas, namun keseluruhan dari berbagai jenis pemeluk agama terdapat di Kota Semarang.

Gambar 2. 2 Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kota Semarang Tahun 2022



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Berdasarkan gambar diatas, pemeluk agama di Kota Semarang mayoritas di didominasi oleh umat muslim dengan jumlah 87,46% atau sekitar 1.451.814 jiwa. Tingginya penduduk muslim di Kota Semarang tidak terlepas dari secara umum

baik di pulau jawa maupun secara keseluruhan negara Indonesia sebagai pemeluk muslim terbesar di Dunia, sehingga dalam hal ini Semarang juga termasuk salahsatu kota di Indonesia yang mendominasi jumlah umat muslim. Diurutan ke dua, terdapat umat kristiani sebesar 6,85% atau sekitar 113.708 jiwa. Kemudian pada urutan ke 3 terdapat penganut Katholik sebesar 4,99% atau 82.832 jiwa. Pada umat Budha dan Hindu, jumlahnya relatif kecil, yakni masing-masing 0,6% (9.960 jiwa) dan 0,07% (1.162 jiwa). Sisanya 0,03 atau sekitar 498 menjawab lainnya.

Dari sektor pendidikan, jumlah Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang (sebagai populasi pada penelitian ini) cukup besar. Sebagai salahsatu jantung kota dari daerah Provinsi Jawa Tengah, kehadiran sekolah-sekolah tersebut sangat diperlukan sebagai upaya pemberian fasilitas pendidikan yang memadai di Kota Semarang.

**Tabel 2. 9 Jumlah Sekolah Menengah Atas
di Kota Semarang Tahun 2022**

Kecamatan	Sekolah Menengah Atas		
	Negeri	Swasta	Jumlah
	2021/2022	2022/2023	
1. Kecamatan Mijen	2	3	5
2. Kecamatan Gunungpati	1	3	4
3. Kecamatan Banyumanik	2	7	9
4. Kecamatan Gajahmungkur	-	4	4
5. Kecamatan Semarang Selatan	2	3	5
6. Kecamatan Candisari	-	3	3
7. Kecamatan Tembalang	1	-	1
8. Kecamatan Pedurungan	1	5	6
9. Kecamatan Genuk	1	2	3
10. Kecamatan Gayamsari	-	3	3
11. Kecamatan Semarang Timur	-	4	4
12. Kecamatan Semarang Utara	1	1	2
13. Kecamatan Semarang Tengah	2	6	8
14. Kecamatan Semarang Barat	1	12	13
15. Kecamatan Tugu	-	1	1
16. Kecamatan Ngaliyan	2	-	2
Jumlah	16	57	73

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Sebagaimana paparan data diatas, dapat terlihat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara jumlah sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Semarang. Pada sekolah negeri, hanya terdapat 16 sekolah dan itupun tidak merata karena tidak setiap kecamatan terdapat sekolah negeri. Kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri yaitu Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Gayamsari, dan Semarang Timur. Sementara pada persebaran sekolah swasta, hanya Kecamatan Tembalang dan Ngaliyan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta.

Kemudian data selanjutnyadari segi teknologi Informasi di Kota Semarang, yakni penggunaan internet. Penggunaan Internet merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk peranan dalam penerimaan informasi lewat media digital. Dalam konteks penelitian ini, informasi dari internet akan sangat memengaruhi bagaimana persepsi pemilih terhadap kandidat presiden dan wakil presiden. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan salahsatu kota dengan jumlah pengakses internet tertinggi di Jawa Tengah. Hal tersebut mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terakhir yang dilakukan pada 2021. Penggunaan Internet di Kota Semarang sendiri sangat beragam.

Tabel 2. 10 Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Ke-Atas yang Mengakses Internet & Tujuannya di Kota Semarang Tahun 2021

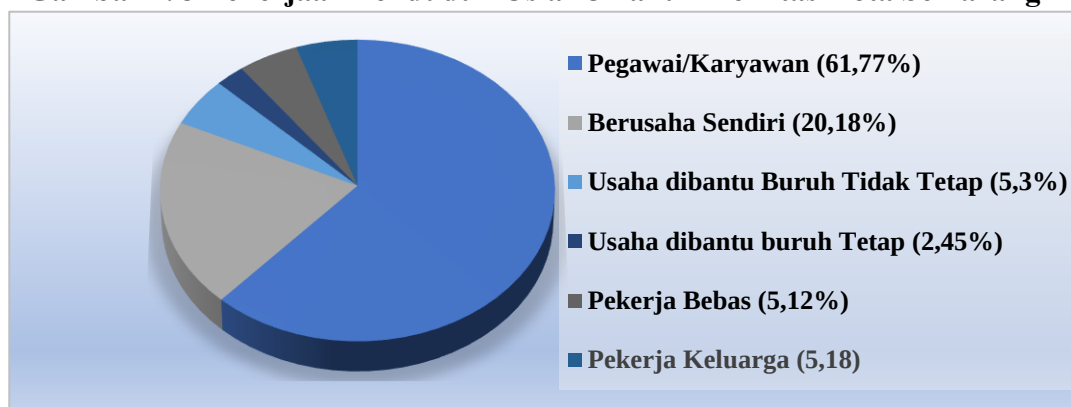
No	Tujuan	Presentase
1.	Mendapatkan Informasi/Berita	73,42%
2.	Mengerjakan Tugas Sekolah	30,41%
3.	Mengirim/Menerima Email	22,18%
4.	Penggunaan Media Sosial/Jejaring Sosial	94,37%
5.	Pembelian Barang/Jasa	24,58%
6.	Penjualan Barang/Jasa	9,48%
7.	Hiburan	66,14%
8.	Fasilitas Finansial	17,34%
9.	Mendapatkan Informasi mengenai barang dan Jasa	26,23%
10.	Lainnya	4,61%

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2021)

Tabel 2.10 tujuan penggunaan internet di atas menunjukkan, bahwa nyaris seluruh warga Kota Semarang menggunakan internet untuk media sosial sebesar 94,37% dan untuk mendapatkan informasi 73,42%. Hal tersebut tentu sangat relevan dengan kontestasi pilihan presiden dan wakil presiden yang nyaris seluruh pertarungan narasi berada pada ranah digital (media sosial, berita, dan lain lain). Dengan data tersebut, mayoritas penduduk semarang bahkan dari usia 5 tahun ke atas sudah memiliki akses ke internet untuk digunakan dalam rangka mencari dan menerima informasi terkait sosok presiden dan wakil presiden yang akan dipilih

Selanjutnya adalah Kota Semarang dalam kacamata perekonomian. Data perekonomian dihadirkan karena diversitas latar belakang ekonomi seseorang diduga memiliki hubungan dengan kecenderungan perilaku memilih. Dalam sudut pandang perekonomian, Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang memiliki kedudukan yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi pulau jawa yang menjadikan Kota Semarang bukan hanya berperan sebagai pusat pemerintahan saja, namun juga sebagai pusat ekonomi di Jawa Tengah. Hal tersebut menjadikan Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas layaknya kota metropolitan pada umumnya seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Bandara Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Poncol dan Tawang, serta akses-akses lain sebagai distributor ekonomi sekaligus alat mobilisasi penduduk dari daerah ke daerah lainnya. Penduduk Kota Semarang sendiri memiliki berbagai jenis pekerjaan yang beragam.

Gambar 2. 3 Pekerjaan Penduduk Usia 15 Tahun Ke-Atas Kota Semarang



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Pada gambar 2.2 terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Semarang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh, yakni sangat dominan sebesar 61,77%. Hal tersebut dikarenakan Kota Semarang merupakan sebuah kota metropolitan, sehingga roda perekonomian dari warga juga dibentuk bagaimana kondisi pekerjaan yang dihadirkan di Kota tersebut. Pegawai dalam hal ini sangat beragam, bisa pegawai kantor/ASN (karena Semarang pusat pemerintahan) ataupun pegawai swasta karena banyak perusahaan swasta yang membuka lapangan kerja karena letaknya yang strategis. Selain itu, sebagian dari mereka juga memilih untuk membuka lapangan kerja sendiri, yakni sebesar 20,18%. Sementara itu, sisanya adalah usaha dengan buruh tetap, buruh tidak tetap, dan juga pekerja keluarga (tidak dibayar seperti ibu rumah tangga). Data berikutnya yang tersaji adalah mengenai angkatan kerja di Kota Semarang

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	619.163	456.664	1.075.827
1. Bekerja	557.795	456.664	994.091
2. Pengangguran Terbuka	61.368	20.368	81.736
II. Angkatan Bukan Kerja	117.643	322.727	440.370
1. Sekolah	49.015	90.663	139.678
2. Mengurus Rumah Tangga	38.374	203.071	241.445
3. Lainnya	30.254	28.993	59.247
Jumlah	30.254	28.993	1.516.197

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Pada data diatas dapat terlihat, bahwa usia produktif di Kota Semarang, yakni usia diatas 15 tahun terbagi atas 2 jenis kegiatan. Kegiatan tersebut adalah angkatan kerja yang berjumlah 1.075.827 dan angkatan bukan kerja yang berjumlah 440.370. Pada angkatan kerja terbagi atas 2 klaster, yaitu bekerja dan pengangguran terbuka.

Pada golongan bekerja, antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, yakni masing masing 557.795 orang dan 456.664. Namun pada pengangguran terbuka, terjadi perbedaan yang signifikan yaitu 61.368 orang pada laki-laki dan hanya 20.368 orang pada perempuan. Pada angkatan bukan kerja, jumlah keseluruhan tidak sebesar pada angkatan kerja, yaitu hanya berjumlah 440.370 orang. Diantaranya mereka bersekolah sebanyak 139.678 dan mengurus rumah tangga sebanyak 241.445. Namun terdapat hal yang menarik bahwa jumlah laki-laki yang mengurus rumah tangga sebanyak 38.374, artinya kemungkinan besar pada jumlah itu juga istri yang bekerja dan suami yang mengurus rumah tangga di rumah, sederhananya mereka bertukar peran. Namun jumlah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 203.071.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana melihat indikator kesejahteraan di Kota Semarang dapat dilihat pada skor IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM sangat penting karena menyangkut bagaimana kondisi kesejahteraan dari penduduk dimana diversitas ekonomi cenderung mampu memperlihatkan perilaku pemilih, terutama dalam konteks di Indonesia yang memiliki budaya politik pragmatis. Pemilih pragmatis yang biasanya menginginkan uang kemungkinan berasal dari background keluarga menengah ke bawah. Sehingga, IPM yang terdiri atas komponen kesehatan, pendidikan, dan perekonomian akan melihat sejauh mana Kota Semarang mampu memberikan kesejahteraan terhadap penduduknya.

Tabel 2. 12 Peringkat IPM Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Nama Kota	Skor IPM
1	Kota Salatiga	84,35
2	Kota Semarang	84,08
3	Kota Surakarta	83,08
4	Kota Magelang	80,39
5	Kab. Sukaharjo	77,94

Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023)

Pada data diatas dapat terlihat bahwa Kota Semarang menempati urutan ke dua pada skor IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan nilai 84,08. Kota Semarang hanya kalah dengan Kota Salatiga. Hal tersebut seharusnya mampu mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Kota Semarang yang nantinya menjadi pemilih sudah cukup memiliki aksesibilitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang telah layak. Dengan skor IPM yang ditunjukkan tersebut seharusnya pemilih sudah lepas dari bayang-bayang perilaku pragmatis yang berbentuk politik uang saat pemilu. Meskipun tentu saja ketimpangan itu tetap ada, artinya masih banyak jumlah penduduk menengah ke bawah di Kota Semarang, namun diharapkan dengan skor IPM yang tinggi tersebut telah menjangkau secara mayoritas penduduk Kota Semarang, sehingga nantinya hanya sebagian kecil yang akan terkena imbas dari politik pragmatis saat musim pemilu.

2.3 Background Paslon & Dinamika Elektoral di Kota Semarang

Sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit sebanyak 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif pada periode sebelumnya. Dari mekanisme undang-undang tersebut, muncullah 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anis Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ketiga paslon tersebut memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusung oleh masing-masing partai pendukungnya atau partai koalisi. Pada pemilu periode sebelumnya, yakni tahun 2019 tidak ada satupun partai yang memenuhi ambang batas dari mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 222 UU Nomor 2017, sehingga pada kontestasi pilpres 2024 partai politik harus berkoalisi.

Paslon Anis-Imin diusung oleh gabungan dari partai politik Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total jumlah kursi DPR 167 kursi atau 29,04%. Pada Paslon

Prabowo-Gibran diusung oleh partai politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) dengan total suara sah pemilu 2019 sebanyak 59.726.503 atau 42,67%. Sementara paslon Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan total suara pemilu 2019 mencapai 39.276.935 atau 28,06%.

2.3.1 Background Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden

Pada tanggal 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara sah menetapkan 3 paslon Presiden dan Wakil presiden untuk menghadapi kontestasi pilpres tahun 2024. 3 Paslon tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yakni terdapat dari golongan sipil/akademis, pengusaha, militer, maupun murni sebagai politikus. Berikut merupakan background pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024:

2.3.1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 01

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anis Rasyid Baswedan atau biasa dikenal dengan sebutan Anis Baswedan merupakan seorang akademisi yang meraih berbagai jabatan strategis dengan status non partai (kalangan profesional/bukan dari partai politik). Anis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1989, kemudian memperoleh gelar Master di Universitas Maryland, College Park Amerika Serikat dengan study *Master of Public Management* tahun 1998, dan mengambil gelar P.hd di Northern Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 2004 dengan mengambil *Doctor of Philosophy* bidang Departemen Ilmu Politik.

Karir dari Anis Baswedan setidaknya terbagi atas 2 bentuk, yakni karir di bidang akademis dan karir politik. Anis pernah menjabat sebagai Manajer Riset IPC, Inc.Chicago, Direktur Riset Indonesia Institute Center pada tahun 2004, dan kemudian menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina pada tahun 2007.

Setelahnya, Anis mulai masuk pada sektor politik dengan menjadi juru bicara pasangan Jokowi-JK pada Pilpres tahun 2010. Setelah Jokowi-JK memperoleh kemenangan pada Pilpres 2010, Anis diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014. Kemudian itu Anis dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Setelah memenangi Pilkada Jakarta 2017, Anis melaju menjadi calon Presiden RI pada kontestasi Pilpres tahun 2024.

Sementara itu wakil dari Anis Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal dengan Cak Imin merupakan seorang Politisi yang dibesarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Cak Imin memulai pendidikan S-1 di FISIPOL Universitas Gajah Mada, kemudian melanjutkan Masternya di Universitas Indonesia bidang Komunikasi, dan mendapatkan gelar Honoris Causa di Universitas Airlangga. Berbeda dengan Anis yang memulai dari ranah akademis, Cak Imin aktif di organisasi pergerakan. Pada tahun 1999 ketika terbentuknya PKB, Cak Imin langsung menjadi Sekretaris Jenderal DPP. Setelahnya dia menjadi Ketua Fraksi PKB di DPR RI dan menjadi Wakil Ketua DPR dari tahun 1999-2009 (dua periode). Cak Imin juga pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pada puncaknya menjadi Ketua Umum PKB pada tahun 2014 hingga sekarang.

Pasangan Anis-Imin ini dalam kontestasi Pilpres 2024 mengambil slogan “Perubahan”. Posisi dari Anis-Imin sering diidentikkan sebagai pasangan oposisi kendatipun 2 partai pengusungnya (PKB & Nasdem) merupakan bagian dari petahana. Visi dari Anis-Imin adalah “Indonesia Adil Makmur Untuk Semua”. Untuk mewujudkan hal tersebut Amin (singkatan paslon Anis-Imin) menawarkan 8 jalan perubahan yang dituangkan lewat misinya, yaitu : 1) memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air; 2) mengentaskan emiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di

kancah global; 3) mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang; 4) membangun kota dan desa berbasis awasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan; 5) mewujudkan manusia indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya; 6) mewujudkan keluarga indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa; 7) memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia; 8) memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan ham, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

2.3.1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 02

Calon residen nomor urut 2, Prabowo Subianto merupakan ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Prabowo merupakan satu-satunya calon yang memiliki latar belakang militer dan telah berkarir di dunia militer selama 28 tahun. Pendidikannya dimulai saat menempuh Akademi Militer Jawa Tengah. Pada tahun 1993, Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha. Kemudian pada tahun 1995, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen). Setelah itu, pada 1998 Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan membawahi sekitar 11 ribu pasukan saat itu.

Setelah pensiun dari dunia militer, Prabowo mulai menapaki jalan di dunia politik. Prabowo bergabung dengan partai Golkar dan menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Partai dan sempat maju pada konvesi calon presiden dari Partai Golkar. Kemudian, Prabowo dan beberapa tokoh lain seperti Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo sepakat untuk mendirikan partai baru. Pada 2008, Prabowo resmi mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan ketua umum pertama adalah Suhardi. Kemudian, pada tahun 2014 Prabowo naik menjadi ketua Umum Partai Gerindra ketika Suhardi tutup usia. Saat dinahkodai Prabowo, Gerindra beberapa kali menjadi penggerak kontestasi besar, seperti pilpres dan pilkada. Tepatnya, pada tahun 2014 dia maju bersama Hatta Rajasa sebagai paslon untuk

pilpres, kemudian pada tahun 2017 dia sukses mengusung Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Kontestasi Pilpres 2019, dia bergandengan dengan Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Jakarta saat itu sebagai paslon untuk pilpres 2019. Prabowo juga menjadi Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.

Sementara untuk wakilnya, yakni Gibran Rakabuming Raka merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Solo. Pendidikannya dimulai di Singapura saat mengambil Management Development dari Institute of Singapore dan lulus pada tahun 2007. Setelahnya, ia melanjutkan studi pada program Insearch di University of Technology Australia dan lulus pada tahun 2010. Setelah lulus, Gibran mulai menapaki dunia usaha dan menjadi pengusaha sukses di Solo. Kemudian Gibran mulai memasuki dunia politik dengan masuk menjadi politisi PDIP dan sukses menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2021. Dua tahun berselang, Gibran ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden RI tahun 2024.

Pasangan Prabowo-Gibran mengusung tema “Keberlanjutan” yang mengarah pada konteks untuk melanjutkan kinerja presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo. Pada Paslon Prabowo-Gibran diidentikkan dengan petahana karena seluruh partai koalisinya berasal dari pemerintahan sebelumnya dan Prabowo sendiri merupakan salahsatu menteri dari pemerintahan sehingga sering diidentikkan sebagai representasi pemerintahan sebelumnya. Visi dari Prabowo-Gibran adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan oleh Prabowo-Gibran dalam 8 misinya, yakni: 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan

industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

2.3.1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 03

Calon presiden nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo merupakan politikus yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ganjar memulai bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada kemudian melanjutkan masternya di Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Ganjar dibesarkan oleh dunia aktivis sehingga dia seringkali melakukan demonstrasi saat menjadi mahasiswa. Semasa kuliah, ganjar juga aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai salahsatu aktivis yang seringkali turun ke jalan untuk melakukan berbagai aksi/demonstrasi.

Sebagai seorang yang aktif menjadi aktivis, Ganjar kemudian meneruskannya menjadi politisi. Ia bergabung dengan PDIP dan menjadi anggota komisi IV DPR RI dari tahun 2004-2009. Selain itu, dia juga memiliki banyak jabatan politis, diantaranya adalah Ketua Pansus RUU Partai Politik DPR RI (2007-2009), Sekretaris I fraksi PDIP DPR RI (2007-2009) , Sekretaris fraksi PDIP MPR RI (2009-2010), dan wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (2010-2013). Setelah itu, Ganjar dinaikkan oleh PDIP untuk mengikuti kontestasi pilihan Gubernur Jawa Tengah dan sukses menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode sekaligus, yakni periode 2013-2018 dan perioden 2018-2023.

Sementara wakil dari Ganjar Pranowo, yakni Mahfud MD merupakan seorang akdemisi sekaligus seorang politikus. Mahfud mengenyam pendidikan S-1 di Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud juga meraih pendidikan S-1 di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Jurusan

Sastra Arab di Universitas Gajah Mada (UGM). Kemudian, beliau menyelesaikan masternya di bidang Politik Universitas Gajahmada dan meraih gelar Doktorat di Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Gajah Mada. Kemudian, beliau menjadi Guru Besar dengan mendapatkan gelar Profesor di Universitas Islam Indonesia.

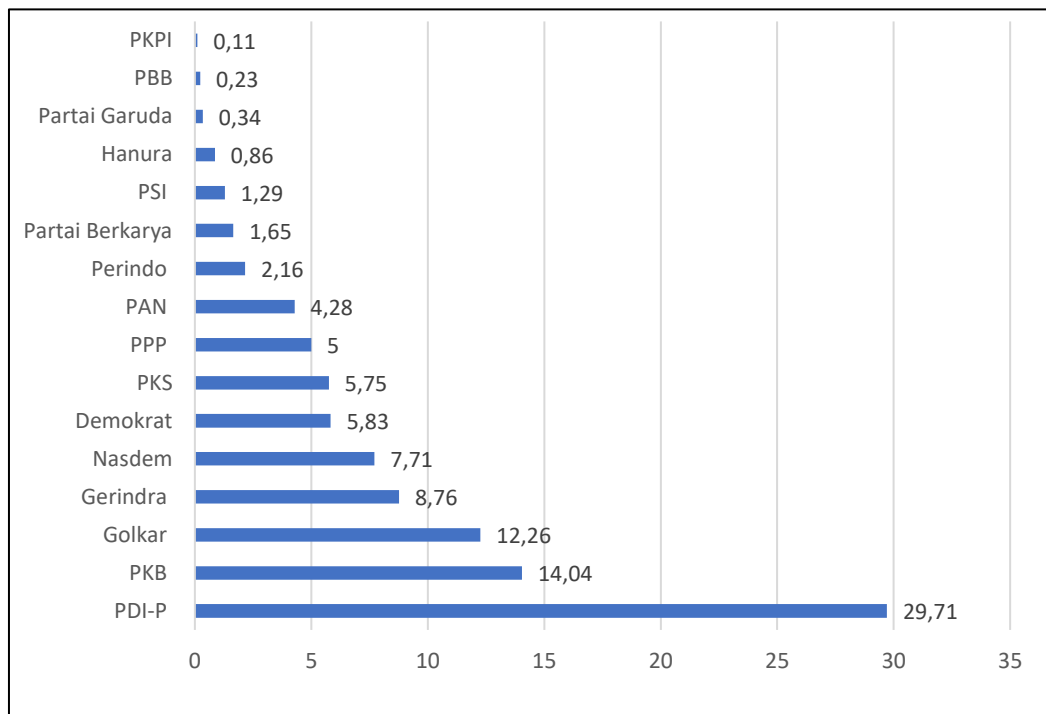
Mahfud MD merupakan satu-satunya diantara 3 paslon yang lain yang pernah menduduki 3 bidang kekuasaan sekaligus, yakni Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Pada bidang ekektif, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI tahun 2000-2001 dan Menteri Kehakiman dan HAM (2001), dan menjadi Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) pada tahun 2019-2024. Pada bidang Yudikatif, Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008-2013. Kemudian pada bidang Legislatif, Mahfud MD pernah duduk di Komisi III DPR RI (2004-2006), komisi I DPR RI (2006-2007), dan kembali di Komisi III pada 2007-2008. Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi Rektor Universitas Islam Kedari (2006-2007).

Pasangan Ganjar-Mahfud membawakan tema berkesinambungan yang telah dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya. Visi Ganjar-Mahfud pada tahun 2024 yaitu “Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan oleh Ganjar-Mahfud ke dalam 8 misi, yakni: 1) mempercepat pembangunan manusia indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; 2)mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (r&i) berdikari; 3) mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tamba; 4) mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; 5) mempercepat pembangunan sistem digital nasional; 6) mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru; 7) mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan ham, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional; 8) mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara

2.3.2 Dinamika Elektoral di Kota Semarang

Kontestasi pilihan presiden dan wakil presiden 2024 menyajikan peta kekuatan yang menarik. Hal tersebut dikarenakan berbagai manuver politik yang terjadi membuat persaingan untuk memperoleh basis suara menjadi semakin sengit. Selama ini, PDIP dikenal memiliki basis suara yang kuat di Jawa Tengah. Berkaca pada pemilu serentak terakhir, yakni tahun 2019, PDIP sangat dominan di Jawa Tengah.

Gambar 2. 4 Presentase Perolehan Kursi DPR di Jawa Tengah Tahun 2019

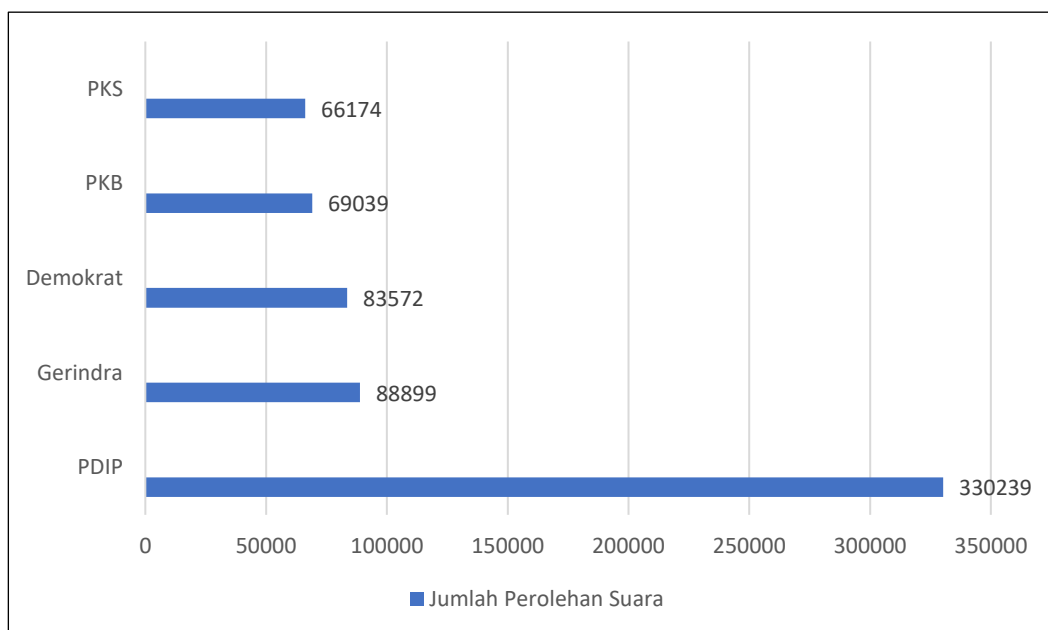


Sumber: Diolah dari Databoks (2019)

Data diatas mengkonfirmasi betapa kuatnya PDIP di Jawa Tengah. Perolehan PDIP melesat jauh yakni 29,71% dibanding parpol lain, bahkan PKB yang menempati urutan kedua sebesar 14,04% tidak ada setengahnya dari presentase jumlah dari PDIP. Selain itu, 11 partai lainnya mendapatkan presentase di bawah 6%. Sehingga pada data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pemerataan proporsi suara karena perolehan suara dari PDIP yang terlalu tinggi dibanding partai-partai lainnya/ketimpangan suara sangat tinggi.

Kemudian lebih spesifik di Kota Semarang juga memiliki andil yang sama terhadap perolehan kursi di DPR. Hal tersebut karena kota Semarang merupakan jantung dari Jawa Tengah, sehingga besar kemungkinan jika Jawa Tengah secara keseluruhan memiliki basis yang kuat dan loyal terhadap PDIP, maka Kota Semarang kemungkinan besar sebagai ibu Kota Jawa Tengah juga berbanding lurus dengan perolehan kursi yang ada di Provinsi.

Gambar 2. 5 Lima Partai Politik Peraih Suara Terbanyak di Kota Semarang Pada Pemilu DPR 2019



Sumber: Diolah dari Databoks (2019)

Melalui persebaran data di atas dapat terlihat bahwa PDIP memberikan kemenangan telak di Kota Semarang. Bahkan, pada posisi ke dua, yaitu partai Gerindra jumlah suaranya nyaris 4x lipat lebih kecil daripada PDIP. Hal tersebut membuktikan bahwa identifikasi partai yang membentuk ikatan psikologis antara pemilih di Kota Semarang dan juga PDIP begitu kuat.

Selanjutnya akan ditampilkan data bagaimana perolehan suara pada pilihan presiden dan wakil presiden di Kota Semarang. Hal tersebut untuk mengafirmasi apakah pada konteks pilpres 2019 perolehan suara PDIP antara pilihan legislatif dan

pilihan presiden linier dan berbanding lurus. Pada Pilpres 2019, PDIP mengukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden-wakil presiden

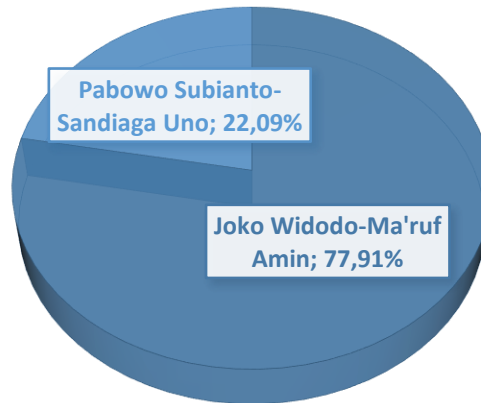
**Tabel 2. 13 Jumlah Suara Pilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu Terakhir Tahun 2019**

Wilayah Kota Semarang	Jokowi- Amin	Prabowo - Sandiaga
1. Kecamatan Pedurungan	88.497	27.304
2. Kecamatan Semarang Barat	77.306	18.074
3. Kecamatan Semarang Selatan	32.932	9.299
4. Kecamatan Semarang Tengah	31.210	5.984
5. Kecamatan Semarang Timur	38.330	6.373
6. Kecamatan Semarang Utara	61.303	11.625
7. Kecamatan Tembalang	80.451	25.750
8. Kecamatan Tugu	14.717	5.481
9. Kecamatan Banyumanik	61.463	23.872
10. Kecamatan Candisari	38.716	9.845
11. Kecamatan Gajahmungkur	28.361	8.725
12. Kecamatan Gayamsari	34.777	7.910
13. Kecamatan Genuk	53.641	13.538
14. Kecamatan Gunungpati	43.313	13.854
15. Kecamatan Mijen	31.697	11.145
16. Kecamatan Ngaliyan	62.971	22.247

Sumber: Diolah dari Open Data KPU RI (2019)

Sebagaimana terlihat pada data diatas, bahwa presiden dan wakil presiden dari PDIP, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan kemenangan telak di Kota Semarang. Bahkan pada tabel tersebut ketika dispesifikkan pada setiap kecamatan, tidak ada satupun kecamatan yang gagal dimenangi oleh paslon 1. Total keseluruhan perolehan suara paslon 1 adalah 77,91% dengan jumlah suara sebanyak 779.685, sedangkan pada paslon 2 hanya 22,09% dengan perolehan suara sebanyak 221.026. Data tersebut membuktikan bahwa pada konteks pemilu serentak tahun 2019, antara perolehan suara legislatif dan pilihan presiden linier dan berbanding lurus, yakni PDIP sama sama kuat pada kedua jenis bidang pemilu tersebut.

Gambar 2. 6 Total Suara Pilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Terakhir Tahun 2019 Kota Semarang



Sumber: Diolah dari Open Data KPU RI (2019)

Setelah mengetahui bagaimana seluruh data yang dipaparkan di atas mengkonfirmasi bahwa konteks pilpres dan pileg pada tahun 2019 berjalan linier dan searah, yakni dominasi PDIP dalam memenangkan pemilu serentak di Kota Semarang, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut akan terulang kembali pada 2024? Hal itu yang menjadi sorotan dan pembahasan yang menarik karena terdapat dinamika yang terjadi yang membuat kondisi pilpres di Kota Semarang sebagai basis PDIP masih belum tertebak. Salahsatu dari berbagai faktor mengapa pada konteks Pilpres di Kota Semarang belum tentu sejalan dengan apa yang terjadi pada 2019 kemarin adalah karena banyaknya manuver politik yang terjadi.

Salahsatu manuver yang terjadi dan dapat diamati adalah bagaimana Presiden Joko Widodo sebagai tokoh sentral presiden yang dimenangkan oleh PDIP cenderung berbalik badan dan dukungannya lebih condong kepada Prabowo Subianto (meskipun secara tidak langsung). Calon wakil presiden dari Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Raka adalah anak sulung dari Presiden Jokowi yang secara mengejutkan bisa menjadi cawapres setelah salahsatu gugatan di MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gibran sendiri juga masih menjabat Wali Kota Solo yang pencalonnya juga diusung oleh PDIP. Berbagai manuver tersebut tentu mampu setidaknya menggoyang posisi PDIP yang memiliki basis kuat di Jawa Tengah (secara spesifik di Kota Semarang) yang juga

pada kontestasi Pilpres 2024 mengusung calon presiden sendiri yakni pasangan Ganjar-Mahfud.

Pemilihan presiden dan wakil presiden sedikit besarnya mengandalkan sosok/figure, baik figure kandidat presiden & wakil presiden itu sendiri maupun figure dari tokoh penting yang berada dibelakangnya. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo merupakan seorang tokoh penting yang memegang peran sangat besar karena pengaruhnya yang sangat kuat sekali. Jika Presiden Joko Widodo menunjukkan bagaimana kecenderungannya justru pada Prabowo Subianto, bukan kepada Ganjar Pranowo yang merupakan calon yang diusung oleh PDIP, apakah nanti kota Semarang akan masih kuat sebagai basis PDIP dengan menyumbang suara besar pada Pilpres 2024 sebagaimana yang terjadi pada 2019? Dinamika tersebut yang sedang diamati dan ditunggu hasilnya, apakah identifikasi partai yang mengakar kuat dan membentuk ikatan psikologis di Jawa Tengah (khususnya di Kota Semarang) pada PDIP mampu digoyang perolehan suaranya oleh Jokowi sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar? Pada 2024 nanti, Kota Semarang sebagai kota dengan loyalis PDIP paling kuat akan membuktikan pertarungan siapa yang akan dimenangkan, identifikasi partai (PDIP) vs figure tokoh (pengaruh presiden Jokowi).

2.4 Proses Tahapan dan Hasil Rekapitulasi Pilpres di Kota Semarang

Proses tahapan pilihan presiden dan wakil presiden mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tahap pertama adalah pendaftaran bakal pasangan calon. Pengumuman pendaftaran pada 16 Oktober-18 Oktober 2023. Setelah itu adalah pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden selama kurang lebih 6 hari, yakni dari tanggal 19 Oktober 2023 – 25 Oktober 2023. Pada tahap tersebut, KPU membuka pendaftar bagi paslon presiden dan wakil presiden. Kemudian, setelah pendaftaran dilakukan pemeriksaan esehatan pada 19 Oktober – 27 Oktober. Pada masa 19 Oktober – 31 Oktober 2023 tersebut juga melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Setelah melalui verifikasi dokumen dan tes esehatan, pada tanggal 13 November 2023 ditetapkan pasangan

secara sah oleh KPU. Sehari setelahnya, yaitu 14 November kemudian dilakukan pengundian nomor urut. Kemudian, pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024 adalah masa kampanye. Lalu pada 11-13 Februari merupakan masa tenang dan puncaknya adalah 14 Februari sebagai hari pencoblosan.

Pilpres 2024 memiliki 3 kandidat, artinya jika lebih dari 2 kandidat berpotensi untuk 2 putaran. Jika salahsatu paslon belum ada yang memenuhi angka 50%+1, maka akan dilaksanakan putaran kedua demi memperoleh suara mayoritas, yakni setengah dari seluruh pemilih (50%+1). Jika Pilpres dilakukan dalam 2 putaran, maka terdapat masa kampanye kembali pada tanggal 2-22 Juni 2024 (selama 20 hari), kemudian pada tanggal 23-25 Juni 2024 adalah masa tenang, dan puncaknya adalah hari H penentuan siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, yaitu 26 Juni 2024. Adapun jika terdapat sengketa, maka batas waktu maksimal yang ditentukan oleh MK adalah 3 hari setelah setelah ditetapkan oleh KPU. Adapun perhitungan suara oleh KPU akan dilaksanakan mulai 15 Februari – 20 Maret 2024.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (27) disebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Konsekuensi dari pasal tersebut mengharuskan peserta pemilu harus lewat partai politik. Dengan demikian, seseorang yang mengikuti kontestasi politik wajib dari partai politik atau diusulkan oleh partai politik. Sejatinya yang bertarung pada pemilu merupakan partai politik, namun karena sifat dari sistem pemilu proporsional terbuka, maka dalam hal ini yang bertarung secara langsung adalah calon yang merupakan kepanjangan tangan dari partai politik. Pada pemilu 2024, terdapat 24 partai politik yang akan bertarung untuk merebut suara dari rakyat. Partai-partai tersebut merupakan partai yang telah disahkan dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU dengan mekanisme persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan 24 partai yang akan bertarung pada kontestasi pemilu tahun 2024.

Tabel 2. 14 Partai Politik Nasional Pemilu Tahun 2024

Nomor Urut	Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18.	Partai Ummat

Sumber: Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022

Ke-18 partai tersebut merupakan partai politik nasional yang akan mewakili masing masing wilayah dan dapilnya dalam pemilihan umum 2024. Jika dibandingkan dengan partai politik peserta pemilu tahun sebelumnya yakni tahun 2019, jumlah partai politik tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, terdapat 16 partai politik nasional yang mendaftar, namun dua diantaranya dinyatakan gugur yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sehingga total partai politik peserta pemilu 2019 adalah 14 partai nasional. Namun pemilu 2024 memiliki jumlah yang lebih besar dengan tambahan 4 partai politik lagi serta beberapa pergantian seperti partai PBB yang dinyatakan gugur oleh KPU pada tahun 2019 kini telah resmi menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Partai terakhir yang disahkan oleh KPU untuk pemilu 2024 adalah partai Ummat.

Selain itu, masih terdapat 6 partai politik lagi, yakni partai politik lokal dari Provinsi Aceh. Partai tersebut akan mewakili konstituen daerah-daerah di Aceh sebagai pemberlakuan khusus wilayah tersebut

Tabel 2. 15 Partai Lokal Aceh Pemilu Tahun 2024

Nomor Urut	Partai Politik
19.	Partai Nanggroe Aceh
20.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa
21.	Partai Darul Aceh
22.	Partai Aceh
23.	Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
24.	Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)

Sumber: Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022

Sesuai regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh bahwa daerah tersebut diberikan otonomi khusus sehingga dapat mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam politik. Sehingga, total terdapat 24 partai politik yang terdiri dari 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh pada Pemilihan Umum 2024.

Selanjutnya adalah penyajian data tentang partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam penggunaan hak politiknya, yakni sebagai pemilih dalam kontestasi pemilihan umum serentak tahun 2024. Secara khusus, tingkat partisipasi masyarakat kota Semarang pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 cukup tinggi dibanding pemilihan legislatif, yakni sebesar 85,09%. Meski demikian, tingkat partisipasi untuk pemilihan legislatif dari DPR tingkat pusat, provinsi, maupun kota serta pemilihan DPD juga relatif tinggi, seluruhnya di atas 80%. Berikut merupakan tingkat Partisipasi masyarakat kota semarang pada pemilihan umum serentak tahun 2024.

Tabel 2. 16 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Semarang pada Pemilihan Umum Serentak 2024

No	Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi
1	Pemilihan Presiden dan Wakil presiden	85,09%
2	Pemilihan Anggota DPR RI	83,94%
3	Pemilihan Anggota DPD RI	84,39%
4	Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	83,89%
5	Pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang	83,78%

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi KPU Pemilu Kota (2024)

Data di atas menunjukkan berbagai angka partisipasi Kota Semarang pada pemilihan serentak terhadap 5 kotak suara, yakni pilpres, pileg DPR RI, DPD, pileg DPRD Provinsi, serta pileg DPRD tingkat kota. Meskipun jaraknya sangat tipis, namun angka partisipasi khusus untuk presiden dan wakil presiden tertinggi dibanding jenis pemilihan lain. Partisipasi tahun 2024 ini lebih tinggi dibanding pemilu serentak tahun 2019.

Selanjutnya adalah daftar pemilih di Kota Semarang. Sebagai kota dengan penduduk yang tinggi, yakni 1.659.975 jiwa, Kota Semarang menyumbang partisipasi besar pada pemilu serentak tahun 2024. Terdapat beberapa kriteria daftar pemilih yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU, yakni DPT, DPTb, serta DPK. Masing masing memiliki perbedaan namun masih memiliki hak suara, hanya saja terdapat perbedaan secara administratif pencatatan. DPT merupakan singkatan dari Daftar Pemilih Tetap, yakni penggunaan hak pilih yang disesuaikan oleh domisili KTP dan disusun sesuai dengan pemilu terakhir. DPTb merupakan Daftar Pemilih Tambahan, yakni penggunaan hak pilih yang disesuaikan jika mengurus surat izin pindah memilih karena berbagai kepentingan tertentu. Sementara itu, DPK atau Daftar Pemilih Khusus merupakan warga yang tidak terdata di DPT atau DPTb, namun memiliki KTP. Khusus untuk DPK hanya diperbolehkan mencoblos pada pukul 12.00 - 13.00 atau 1 jam terakhir sebelum penutupan.

Tabel 2. 17 Daftar Pemilih Kota Semarang pada Pemilu Serentak 2024

Jenis	DPT	DPTb	DPK
Pemilihan Presiden dan Wakil presiden	1.239.669	20.577	14.069
Pemilihan Anggota DPR RI	1.239.669	20.577	6.525
Pemilihan Anggota DPD RI	1.239.669	20.577	11.068
Pemilihan Anggota DPRD Prov Jawa Tengah	1.239.669	20.577	5.990
Pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang	1.239.669	20.577	4.674

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU Kota Semarang (2024)

Pada jumlah DPT Kota Semarang angkanya selalu sama di berbagai macam pemilihan, yakni 1.239.669. Hal tersebut dikarenakan finalisasi dari DPT dilakukan jauh jauh hari sebelum hari pencoblosan sehingga terdapat data pasti, selain itu dikarenakan pemilu digelar secara serentak sehingga jumlah semua datanya sama. Hal tersebut juga berlaku pada DPTb yang penetapannya masih terbilang jauh dari hari pencoblosan. Namun yang berbeda adalah DPK atau daftar pemilih tambahan karena jenis pemilih ini tidak terdaftar sehingga tidak bisa di prediksi berapa jumlahnya. Pada data di atas dapat terlihat, bahwa DPK di Kota Semarang yang paling banyak adalah pilpres, yakni sebanyak 14.069. Sementara itu pada urutan yang paling kecil adalah DPRD kota Semarang dengan jumlah DPK hanya 4.674. Data di atas menunjukkan antusiasme yang paling tinggi (walaupun berstatus tidak terdaftar secara resmi pada TPS pilihan) adalah pilpres. Hal tersebut membuktikan bahwa pilpres masih menjadi alasan kuat warga di Kota Semarang untuk memilih dibandingkan pada pileg. Hal tersebut terlihat jelas dari data DPK yang menjadi bukti bahwa banyak prmilih yang tidak punya hak pilih tetap pada TPS (bukan pemilih DPT maupun DPTb) masih menginginkan menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden daripada pilihan legislatif.

Selanjutnya adalah jumlah penggunaan hak pilih. Meskipun daftar pemilih telah ditetapkan, namun tidak semuanya akan menggunakan hak pilih tersebut. Penggunaan hak pilih akan dihitung dalam jumlah partisipasi dalam pemilihan

umum sebagai dasar legitimasi yang kuat pengangkatan pemimpin maupun wakil rakyat melalui pemilihan umum. Semakin tinggi jumlah pemilih yang menggunakan haknya, maka semakin tinggi partisipasi politik melalui pemilihan umum. Berikut merupakan jumlah penggunaan hak pilih pada pemilu serentak 2024 di Kota Semarang

Tabel 2. 18 Jumlah Penggunaan Hak Pilih Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Semarang

Jenis Pilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pemilihan Presiden dan Wakil presiden	497.402	557.397	1.054.779
Pemilihan Anggota DPR RI	491.962	548.568	1.040.530
Pemilihan Anggota DPD RI	493.973	552.1361	1.046.109
Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	491.713	548.242	1.039.955
Pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang	490.752	574.816	1.038.568

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU Kota Semarang (2024)

Jumlah pemilih yang paling besar adalah pilpres, yakni mencapai 1.054.779 jiwa. Sementara yang paling kecil adalah pemilihan anggota DPRD level kota, yakni 1.038.568. Meskipun demikian, jarak antara antara pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD level kota memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, yakni pada range 1.038.568 – 1.040.530. Jarak antara pileg tersebut tidak terlalu jauh. Sementara jarak perolehan pilpres signifikan jauh daripada jumlah pileg.

Dari segi analisis gender, perempuan mendominasi jumlah pilihan daripada laki-laki. Baik pemilihan presiden atau pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD level kota) seluruhnya didominasi oleh jumlah perempuan yang lebih besar daripada laki-laki. Hal tersebut dikarenakan jumlah DPT di Kota Semarang juga lebih besar perempuan daripada laki-laki. Dari total

jumlah DPT yang ditetapkan yakni 1.239.669 pemilih, 637.526 diantaranya adalah perempuan. Sementara sisanya, yakni 602.143 adalah pemilih laki-laki. Terdapat selisih sekitar lebih dari 35 ribu antara pemilih tetap laki-laki dan Perempuan. Oleh karenanya ketika dianalisis melalui perbandingan gender, jumlah pemilih perempuan lebih besar dominasinya daripada jumlah pemilih laki-laki.

Terlepas dari jumlah data di atas, terdapat data jumlah pemilih lain, yakni jumlah pengguna hak pilih disabilitas. Sebagaimana dalam PKPU No. 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih pada pasal 4 disebutkan syarat menjadi pemilih diantaranya adalah usia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, berdomisili di wilayah NKRI, serta tidak terikat menjadi prajurit TNI atau Polri. Selain itu, penyandang disabilitas juga punya hak politik, yaitu hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak dalam konteks ini boleh menjadi pemilih karena pemilu juga di desain secara inklusif dimana semuanya berhak untuk berpartisipasi asalkan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh PKPU. Berikut merupakan daftar penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Tabel 2. 19 Jumlah Penggunaan Hak Pilih Disabilitas Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Semarang

Jenis Pilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pemilihan Presiden dan Wakil presiden	1.161	1.363	2.524
Pemilihan Anggota DPR RI	1.133	1.361	2.494
Pemilihan Anggota DPD RI	1.130	1.352	2.482
Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	1.127	1.364	2.491
Pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang	1.143	1.355	2.498

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU Kota Semarang (2024)

Jumlah penggunaan hak pilih disabilitas sebagaimana pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa antusiasme pilihan presiden lebih tinggi daripada empat pilihan legislatif lainnya (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Semarang). Dalam sudut pandang gender, pemilih perempuan juga masih mendominasi daripada jumlah pengguna hak pilih laki-laki. Total keseluruhan pada rata-rata penggunaan hak pilih berada pada range 2.482 – 2.524 pemilih.

Selanjutnya hasil pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Kota Semarang. Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan wakil presiden di Kota Semarang telah dilaksanakan dan diantara total 1.239.669 DPT, 20.577 DPTb, serta 20.577 DPK sebagai daftar pemilih terdapat suara yang dihitung (sah) dan tidak bisa dihitung (tidak sah).

Tabel 2. 20 Jumlah Penggunaan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Semarang Tahun 2024

Kriteria Suara	Jumlah
Suara Sah	1.031.142
Suara Tidak Sah	23.657
Suara Sah dan Tidak Sah	1.054.799

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU Kota Semarang 2024

Berdasarkan data diatas, total 1.054.799 atau 85,09% masyarakat kota semarang telah menggunakan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Diantara jumlah tersebut, terdapat 1.031.142 suara sah dan 23.657 suara dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, dari 1.031.142 suara sah tersebut akan terlihat bagaimana preferensi dari rakyat Semarang dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presidennya. Berikut merupakan hasil dari rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel 2. 21 Rekapitulasi Perhitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Semarang Tahun 2024

No. Urut	Calon Presiden dan Wakil presiden	Perolehan Suara
Paslon 1	Anis Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar	140.145
Paslon 2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	495.019
Paslon 3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	395.978

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU Kota Semarang 2024

Terlihat pada data di atas, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 495.019 suara, kemudian disusul Ganjar-Mahfud yang bersaing ketat dengan 395.978 suara, serta Anis-Imin diurutan terakhir dengan 140.145 suara. Perolehan tersebut sedikit mengejutkan karena jika berkaca pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai pemenang pemilu sekaligus petahana, yakni PDIP, perolehan suara 2019 lebih dari 700 ribu yang memilih paslon yang diusung oleh PDIP. Hal tersebut tentu menurun jika disandingkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang “hanya” memperoleh tidak lebih dari 400 ribu suara.

Setelah melihat rekapitulasi di Kota Semarang, selanjutnya akan ditelisik hasil dari rekapitulasi di Jawa Tengah apakah hasilnya linier dengan hasil yang ada di Kota Semarang? Berikut merupakan rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tingkat Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. 22 Rekapitulasi Perhitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No. Urut	Calon Presiden dan Wakil presiden	Perolehan Suara
Paslon 1	Anis Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar	2.866.373
Paslon 2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	12.096.454
Paslon 3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	7.827.335

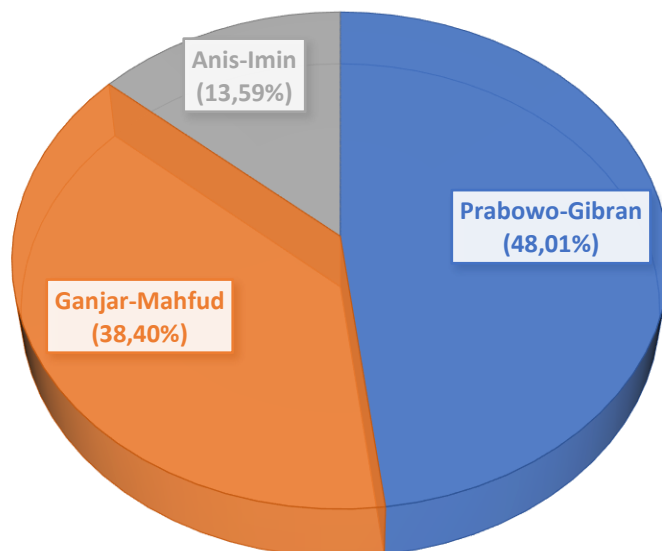
Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU R1 (2024)

Hasil dari rekapitulasi di Kota Semarang menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran unggul disusul Ganjar-Mahfud dan terakhir Anis-Imin, maka hasil rekapitulasi pada tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan linier atau hasilnya sama dengan rekapitulasi pada tingkat daerah provinsi Jawa Tengah. Prabowo-Gibran unggul dengan 12 juta suara disusul Ganjar-Mahfud dengan 7,8 juta suara, dan paling kecil adalah paslon 3 Anis-Imin dengan hanya memperoleh 2,8 juta saja. Hasil tersebut menunjukkan linieritas antara hasil perolehan suara di Kota Semarang dengan hasil perolehan di Provinsi Jawa Tengah dengan masing-masing menempatkan posisi pertama pada Prabowo-Gibran, posisi ke dua Ganjar-Mahfud, dan posisi ke tiga Anis-Imin.

Selama ini, Jawa Tengah apalagi Kota Semarang sebagai ibukota dikenal memiliki kekuatan akar rumput yang kuat kepada PDIP dengan berkaca pada 2 edisi pemilihan presiden dan wakil presiden yakni tahun 2014 dan 2019 dimana PDIP menang secara telak di Kota Semarang. Edisi 2014 Jokowi-JK yang diusung menang secara signifikan dengan 624.289 suara (68,10%) dari lawannya yakni Prabowo-Hatta yang mendapatkan suara sebesar 292.496 (31,90%). Sementara Pada edisi berikutnya, Jokowi yang dipasangkan oleh Ma'ruf Amin oleh PDIP memperoleh suara lebih telak lagi, yakni sebesar 779.685 atau setara 77,91% dan unggul jauh dari lawannya yaitu Prabowo-Sandiaga dengan perolehan 221.026 suara atau setara dengan 22,09%.

Dengan memenangi dua edisi pilpres di Jawa Tengah terutama di Kota Semarang secara telak tersebut serta dengan tingginya kemenangan di legislatif membuat Jawa Tengah disebut sebagai “kandang banteng” (julukan kepada PDIP). Namun pada edisi Pilpres kali ini, PDIP mengalami kekalahan di Kota Semarang sebagai basisnya. Jika dilihat secara presentase pun jaraknya cukup jauh, yakni terpaut sekitar 4 juta suara lebih atau selisih sekitar 10%. Berikut merupakan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Semarang jika dilihat melalui persebaran *bar chart* melalui presentase.

Gambar 2. 7 Persentase Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Semarang Tahun 2024



Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Pemilu KPU Kota Semarang (2024)

Pasangan Prabowo-Gibran nyaris mendapatkan setengah suara dari Kota Semarang itu sendiri (nyaris 50%). Padahal jika ditarik ke belakang, pada 2 edisi pemilu sebelumnya Prabowo selalu mengalami kekalahan di Jawa Tengah, terlebih di Kota Semarang sebagai basis dari PDIP. Namun pada tahun 2024, keadaan berbalik dimana Prabowo justru mendapatkan suara yang besar dari wilayah yang dahulu kalah secara telak. Di sisi yang lain, pasangan nomor urut pertama, yakni Anis-Imin justru mendapatkan suara yang paling sedikit dengan kurang lebih hanya sekitar 13% saja.

Sementara itu, jika ditarik pada rekapitulasi suara nasional, Prabowo-Gibran mendapatkan suara tertinggi dengan menyentuh lebih dari 58% diikuti dengan suara Anis-Imin di posisi dua dan Ganjar-Mahfud justru turun di posisi terakhir. Dengan adanya paslon yang menyentuh perolehan suara di atas 50% (Prabowo-Gibran) di rekapitulasi akhir, maka telah ditentukan pemenangnya dan tidak perlu untuk melakukan pemilu 2 putaran. Paslon Prabowo-Gibran resmi memenangkan kontestasi pemilu 2024. Berikut merupakan hasil lengkap mengenai perolehan suara seluruh paslon pada rekapitulasi akhir di tingkat nasional.

Tabel 2. 23 Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

No. Urut	Calon Presiden dan Wakil presiden	Perolehan Suara	Presentase
Paslon 1	Anis Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar	40.971.906	24,95%
Paslon 2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	96.214.691	58,58%
Paslon 3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	27.040.878	16,47%

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI (2024)

Jika dibandingkan dengan seluruh rekapitulasi suara di level nasional, perolehan suara Prabowo-Gibran konsisten baik di tingkat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan level nasional. Ketiga level perhitungan suara yang berjenjang tersebut menempatkan Prabowo-Gibran sebagai paslon dengan perolehan tertinggi. Namun terdapat perbedaan posisi 2 dan 3 antara di Kota Semarang dan Jawa Tengah dengan perolehan pada level nasional. Di Kota Semarang dan Jawa Tengah sebagaimana tabel 2.21 dan 2.22 menunjukkan bahwa Ganjar-Mahfud berada pada posisi ke 2 dan Anis-Imin pada posisi ke 3. Sementara pada rekapitulasi suara nasional sebagaimana pada tabel 2.23 menunjukkan justru Anis-Imin yang naik di posisi ke dua sementara Ganjar-Mahfud turun ke posisi 3. Artinya, Jawa Tengah khususnya Kota Semarang sebagai wilayah yang menyumbang Ganjar-Mahfud suara besar sementara menggerus suara dari Anis-Imin. Sebaliknya, unggulnya Anis-Imin atas Ganjar-Mahfud di level nasional berarti disumbang dari berbagai wilayah lain di Indonesia (selain Jawa Tengah) yang memberikan suara signifikan terhadap Anis-Imin daripada Ganjar-Mahfud. Sehingga, secara rekapitulasi akhir di level nasional, Anis-Imin lebih unggul daripada Ganjar-Mahfud.

2.5 Kesimpulan Latar Belakang Sosial-Politik Kota Semarang

Pada bab 2 mengenai latar belakang sosial dan politik memberikan sebuah gambaran mengenai kompleksitas demografi sosial serta dinamika politik di Kota Semarang. Selain itu diberikan visualisasi mengenai wilayah Kota Semarang itu sendiri sebagai bagian dari objek penelitian. Secara umum, penggambaran Kota Semarang pada bab ini terbagi atas 2 bentuk, yang pertama adalah deskripsi secara fisik Kota Semarang dan yang kedua adalah deskripsi sosial-politik. Deskripsi fisik diperlukan untuk visualisasi wilayah penelitian agar tercipta gambaran bagaimana keadaan secara empiris di Kota Semarang, sedangkan deskripsi sosial-politik menganalisis bagaimana perilaku individu yang menempati wilayah tersebut sebagai bagian dari objek penelitian sosial yang sifatnya sangat dinamis dan fluktuatif.

Pada ranah fisik, Kota Semarang berkembang menjadi Kota Metropolitan dengan pembangunan infrastruktur yang sangat memadai sebagai jantung ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas yang menunjang dan menggerakkan perekonomian Jawa Tengah seperti Pelabuhan, Bandara, Stasiun, dan berbagai aset lain yang menunjukkan “kemapanan” Kota Semarang dalam hal sentra perekonomian Jawa Tengah. Secara tinjauan historis pun eksistensi keberadaan Kota Semarang secara administratif telah ada sejak zaman 1950, yakni 5 tahun pasca kemerdekaan Indonesia dimana pada tahun tersebut Kota Semarang sudah diberikan keistimewaan menjadi ibu Kota Provinsi. Bahkan, terdapat peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang terjadi di Kota Semarang, yaitu “Pertempuran 5 Hari di Semarang” yang menjadi ikon besar bahwa kawasan ini menjadi bagian yang penting dalam mengupayakan dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada Ranah sosial-politik, masyarakat Kota Semarang juga memiliki sifat heterogeni dan dinamika politik yang menarik. Pada aspek sosial, Kota Semarang terbilang cukup baik dalam menangani berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, baik dari sifat kependudukannya yang memiliki proporsi gender yang nyaris berimbang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi (jika

dibandingkan dengan daerah di Jawa Tengah lain), serta jumlah penduduk yang kompleks, heterogen, dan cukup besar sebagai modal yang memadai demi meneruskan pembangunan. Pada aspek politik, Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah yang mendapatkan julukan sebagai “kandang banteng” tentu menjadi pusat perhatian dimana secara mengejutkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung mengalami kekalahan di basisnya sendiri. Hasil perolehan suara Prabowo-Gibran konsisten mendapat perolehan suara tertinggi baik di level Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan pada level nasional. Sementara suara Ganjar-Mahfud yang mendapatkan perolehan posisi ke dua di tingkat Kota Semarang dan Jawa Tengah justru ketika di ditarik di level nasional suaranya turun menjadi posisi ke tiga dan Anis-Imin yang naik pada posisi ke dua. Artinya perolehan suara Ganjar-Mahfud di Kota Semarang dan Jawa Tengah menyumbang kuantitas yang besar dan justru menggerus suara dari Anis-Imin, sementara Anis-Imin mendapatkan suara yang lebih banyak di daerah lain sehingga pada rekapitulasi suara nasional mampu mengalahkan Ganjar-Mahfud.

Di sisi yang lain, justru perolehan hasil pemilihan legislatif PDIP masih tetap di jalur kemenangan. Terdapat peta politik yang menarik yang menunjukkan kemenangan partai pada ranah legislatif, namun mengalami kekalahan pada pemilihan presiden yang diusung. Hal ini tentu menimbulkan keunikan dalam fenomena politik antara pilpres dan pileg yang tidak linier di jalur kemenangan karena belum pernah terjadi di sejarah politik Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini berusaha meninjau dari segi pemilih pemula yang memiliki kuantitas besar di Kota Semarang, apakah pemilih pemula tersebut cenderung memilih calon presiden dan wakil presiden dari partai basisnya sendiri (calon dari PDIP yaitu Ganjar-Mahfud) atau justru memiliki preferensi pilihan lain (Anis-Imin atau Prabowo-Gibran) karena alasan tertentu.